

**PARTISIPASI MASYARAKAT KHUSUSNY KAUM MUDA DALAM
PEMILIHAN LEGISLATIF DI DESA KALOBBA
KECAMATAN TELLULIMPOE**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ilmu
Politik (S.IP) pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

MIN FADLI

NIM : 30600109016

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR 2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh tanggungjawab, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah penyusun sendiri, jika kemudian hal ini terbukti ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuat dari orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar,

2014

Penulis

MINFADLI
30600109016



KATA PENGANTAR



Kuserahkan cintaku pada Ilahi, atas segala anugerah kesempurnaan-Nya, hingga pada pencerahan epistemology atas seluruh kesadaran alam semesta. Bimbinglah kami menuju cahaya-Mu, dan tetapkanlah pada orbit kebenaran Islam sejati.

Shalawat dan Salam atas Rasulullah san revolusioner sejati, sang pemimpin agung yang selamanya akan menjadi tauladan umat manusia. Juga para keluarganya yang suci sebagai penggendang cahaya Islam.

Penulis amat menyadari bahwa dari awal penulisan hingga akhirnya penulisan skripsi ini telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, motivasi, pikiran, tenaga, dan doa. Untuk itulah penulis dalam kesempatan ini akan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ibu tercinta (Hj. Muliati) dan Ayahanda (H. Usman) yang telah mengasuh, menyayangi, menasehati, membiayai dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik :

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT,M.S selaku rector beserta Pembantu Rektor I, II, III UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag selaku Dekan beserta Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si. ketua jurusan Ilmu Politik dan sekretaris Jurusan Ilmu Politik.

4. Syahrir Karim, S.Ag,M.Si. Sebagai pembimbing I dan Syamsul Asri, S.IP,M.Fil.I sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Para dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar.
6. Terkhusus buat saudara dan saudari kandung Supriadi, Muhammad Adil, dan Reski Amelia yang telah memberikan dukungan, doa dan segala-galanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk para sahabat terkhusus teman jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Makassar. Terima kasih atas segala perhatian serta dorongan dan semangat buat penulis.
8. Teman-teman Pengurus Himpunan Mahasiswa Sinjai atas semangat motivasinya.

Akhirnya kepada Allah swt jualah kami memohon Rahmat dan Hidayah-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, bangsa, dan Negara. Amin.

Wassalam,

Makassar,09 Agustus 2014

Penulis,

MINFADLI
NIM: 30600109016

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	19
 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kabupaten Sinjai	26
B. Letak Geografis Desa Kalobba	29
C. Gambaran Umum Pileg Desa Kalobba Kec.Tellulimpoe	36
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Partisipasi Politik Pemilihan Legislatif Kaum Muda	56
B. Factor Memengaruhi Partisipasi Politik Kaum Muda	61

1. Modernisasi	64
2. Proses Terjadinya	64
3. Pengaruh intelektual dan meningkatnya komunikasi politik	65
4. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik	65
5. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan social	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar total Wajib pilih di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe	37
Table 2.2 Daftar Pemilih Tetap yang hadir per TPS di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe	38
Table 2.3 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa Kalobba Tahun 2014	45
Tabel 2.4 Potensi dan Jumlah Penduduk Desa Kalobba	50



ABSTRAK

MINFADLI “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Tahun 2014*”

Penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran objektif tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif, dalam hal ini pilihan politik kaum muda dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif di desa Kalobba yang diterapkan oleh masyarakat dan apa yang memotivasi masyarakat dalam pemilihan legislatif di desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis, di mana penulis mencoba untuk meneliti atau menganalisa dengan mencoba memberikan gambaran dan penjelasan mengenai kenyataan empiris yang dijadikan objek penelitian dengan menggunakan *Teori Pilihan Rasional, Teori Prilaku Pemilih Dan Teori Partisipasi*. Pada pemilihan legislative di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe tahun 2014, kaum muda memiliki konteks yang berbeda-beda. Setiap kaum muda memiliki lingkungan social dan proses sosialisasi yang juga berbeda-beda. Dalam sosialisasi lingkungan social kaum muda, terjadi penyerapan nilai-nilai informasi yang diterima dalam komunikasi politik. Selain itu tingkat pendidikan berkorelasi dengan akses informasi yang dipengaruhi bangunan pengetahuannya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik kaum muda di desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe sangat sedang, walaupun masyarakat dan kaum muda yang sangat antusias dalam pemilihan legislative, hal ini disebabkan oleh beberapa factor, yaitu modernisasi, proses terjadinya, pengaruh intelektual dan meningkatnya komunikasi politik, adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin partai politik, dan adanya keterlibatan-keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan social pada metode ini dapat bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi dan persepsi dalam pemilihan legislatif secara umum dengan melibatkan masyarakat dan kaum muda dilokasi penelitian

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Legislatif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tercipta atau terwujudnya suatu kebudayaan adalah sebagai hasil interaksi antara manusia dengan segala isi alam raya ini. Manusia yang telah dilengkapi tuhan dengan akal dan pikirannya menjadikan mereka khalifah dimuka bumi dan diberikan kemampuan yang disebutkan oleh Supartono sebagai daya manusia. Manusia memiliki kemampuan daya antara lain akal, intelegensia, dan intuisi; perasaan dan emosi; kemauan; fantasi dan perilaku dengan sumber – sumber kemampuan daya manusia tersebut, nyatalah bahwa manusia menciptakan kebudayaan.

Ada hubungan dialektika antara manusia dan kebudayaan, kebudayaan adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena ada manusia penciptanya dan manusia dapat hidup ditengah kebudayaan yang diciptakannya. Kebudayaan akan terus hidup manakala ada manusia sebagai pendukungnya, dialektika ini didasarkan pada pendapat Peter L. Berger yang menyebutkan sebagai dialektika fundamental¹ sangat diperlukan dimanapun dan kapanpun diadakan. Dari tahap eksternalisasi adalah proses pencurahan diri manusia secara terus – menerus kedalam dunia melalui aktivitas fisik dan mental. Tahap objektivitas adalah tahap aktivitas manusia menghasilkan suatu

¹Effendi Ridwan, Ilmu dan Budaya dasar. cetakan 2012; edisi refisi. kencana media group halaman 36 - 37

realita objektif, yang berada diluar diri manusia. Tahap internalisasi adalah tahap dimana realitas objektif hasil ciptaan manusia diserap oleh manusia kembali. Pemahaman terhadap realitas social tampaknya tidak cukup hanya dikaji dengan satu disiplin ilmu, karena suatu disiplin ilmu seringkali kurang lengkap dalam memandang objek kajiannya. Pemikiran para sarjana yang berusaha menggabungkan beberapa disiplin ilmu untuk memahami realitas social secara lebih komprehensif. Cara pandang interdisiplinner ini pada kelanjutannya mempunyai implikasi munculnya bidang studi baru, timbulnya studi komunikasi politik tidak lepas dari cara pandang interdisiplinner tersebut. Komunikasi politik sebagai bidang kajian baru pada mulanya berasal dari beberapa studi, seperti studi retorika, analisis propaganda, studi tentang pendapat public, studi tentang perilaku pemilih, hubungan pemerintah dengan media, dan studi teknik.

Partisipasi politik masyarakat, khususnya partisipasi pada pemilihan legislative (DPD, DPR) dalam ilmu politik terangkum sebagai bagian ilmu dari kajian perilaku politik khususnya studi kasus desa kalobba kecamatan tellulimpoe perilaku politik yang dibahas dalam bab ini tidak hanya berkenaan dengan persoalan pemberian hak suara dalam pemilihan pemilihan kepala daerah yang dicalonkan oleh partai – partai politik tertentu maupun kepala daerah yang mencalonkan orang perorang (independen), tetapi juga membahas bagaimana para calon sebagai actor yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah - daerah berperilaku dan bertindak dalam merebut hati pemilih (voters). Pada sisi pertama, perilaku politik masyarakat yang berkaitan dengan

pemungutan suara dalam ilmu politik disebut juga dengan istilah voting behavior, sedangkan sisi kedua, perilaku calon (dan tim suksesnya) yang berusaha untuk merebut hati rakyat dalam khazanah ilmu politik dikenal istilah political marketing.

Guna mempermudah menganalisis dan menemukan jawaban atas fenomena-fenomena terhadap pilihan legislative yang telah berlangsung di Indonesia, di bab ini akan dibahas mengenai : (I) Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pilihan warga dalam pemilihan DPD, DPR ; (ii) apa upaya yang sering dilakukan atau digunakan oleh calon-calon, DPRD dalam merebut hati rakyat serta (iii) ; bagaimana menjelaskan hubungan antara voting behavior dan political marketing dalam pemilihan Legislatif? Sebelum sampai pada penjelasan yang lebih lanjut perlu disampaikan disini, bahwa penjelasan mengenai isi ketiga sub bab pada bahasan tersebut yang akan dielaborasi secara bergantian.

Tidak kronik seperti urutan diatas. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penjelasan. Karena menggunakan urutan-urutan diatas akan memisahkan contoh dan kajian yang akan diurai. Untuk dilakukan tanpa menanggalkan ketiga bahasan utama. Secara garis besar dapat didefinisikan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak langsung, amat ditentukan oleh suara mayoritas warga masyarakat yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan.

Definisi umum ini, setidaknya selaras dengan apa yang diutarakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku klasiknya *Capitalism, Socialism, and Democracy* dalam kampanye political marketing dan bersifat konvensional pandangan referensi Pilkada dan dinamika politik Lokal melalui otonomi Daerah mengatakan bahwa :

1. Partisipasi Politik dan Prilaku Pemilih

Partisipasi politik menurut Huntington dan Joan Nelson adalah suatu sikap politik yang mencakup segala kegiatan dan aktifitas (action) yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya memengaruhi pejabat – pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Serupa dengan apa yang diterangkan oleh Huntington dan Nelson, Resnick dan Tyler, Sewind sebelumnya telah menguraikan bahwa intisari partisipasi politik adalah tindakan masyarakat yang dapat memengaruhi keputusan politik.

Asumsinya adalah orang yang paling tahu tentang suatu keinginan ialah masyarakat atau individu itu sendiri. Oleh karena itu, partisipasi politik individu didalam agregasi masyarakat sangat berperan dalam menentukan kebijakan pemerintah yang menyangkut harkat kehidupan mereka sendiri. Dalam konteks pilihan legislatif, partisipasi politik warga saat pemilihan pun berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, untuk meningkatkan semua itu, maka warga diminta untuk memilih calon-calon yang ada dengan merujuk pada program kegiatan yang ditawarkan oleh para calon pada saat

berkampanye. Pada saat masyarakat menghadiri kampanye dan melihat salah-satuh calon kepala daerah menawarkan program kerja yang ternyata relative sama dengan apa yang ada dalam benaknya atau prefensinya (tentang kesejahteraan dan pemberdayaan), maka tentu bisa saja mungkin masyarakat atau indifidu tersebut memilih calon tadi.

Tapi pertanyaan yang muncul kemudian, manakala program kerja yang ditawarkan oleh calon-calon dalam pilihan legislative dan dinamika politik lokal² tidak cocok dengan preferensinya apakah indifidu harus mendukung secara mutlak program-program yang telah dirancang oleh pemerintah (calon terpilih) misalnya dari semua calon yang mencalonkan sebagai kepala daerah tidak ada satupun yang sesuai demokrasi local dan mekanisme penyelenggaraan pilihan legislative maka pada bab ini akan mengelaborasi mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul selama proses pemilihan legislatif, ada banyak masalah yang bisa diidentifikasi selama proses pemilihan legislatif.

Ia tidak hanya berlangsung pada tahap persiapan namun juga terjadi pada tahap pelaksanaan pilihan legislative yang meliputi pertama, tidak akuratnya penetapan data pemilih. Masalah data pemilihan merupakan masalah yang mendasar dan hampir seluruh pilihan legislative megalami ketidakakuratan data pemilih dan pada sebagian daerah. Hal ini disebabkan koordinasi antara dinas kependudukan PPS untuk menyesuaikan DP4 dengan daftar pemilih dalam partsipasi politik.

²Leo agustino 3,pilkada dan dinamika politik local (cet ke-1, 2009 yogyakarta; pustaka pelajar) halaman 188-190

Menurut mereka, ada dua jenis³ partisipasi politik yang bergerak pada satu garis spectrum, posisi pemilihan dalam spectrum dapat berada pada sepanjang dua kutub garis tersebut. Pertama disebutnya sebagai partisipasi otonom (otonomis) dan kedua, partisipasi mobilisasi (Huntington dan nelson). Partisipasi otonom adalah suatu jenis partisipasi yang diharapkan dari setiap indifidu dalam agregat masyarakat baik dalam hal memberikan masukan mengenai ide dan konsep tentang suatu hal pada pemerintah, mendirikan organisasi massa, menjadi kelompok penekan (pressure groups) bagi pemerintah.

Belum banyaknya penelitian yang mengungkapkan perilaku masyarakat dalam pemilihan legislatif dari beberapa sisi yang berbeda tentu saja merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan memfokuskan penelitian ini pada: “Partisipasi Khususnya Kaum Muda dalam Pemilihan Legislatif di Desa Kalomba Kecamatan Tellulimpoe Tahun 2014.”

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul partisipasi politik dalam pilihan legislative desa kalobba kecamatan tellulimpoe kabupaten sinjai tahun 2014.

³Leo agustino, pilkada dan dinamika politik local : refleksi dan analisis terhadap politik diindonesia masa kontemporer (cetakan ke – 1; Yogyakarta : penerbit pustaka pelajar cet. 2009) hal. 188 - 190

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang perlu mendapat gambaran yang jelas yaitu :

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat khususnya kaum muda terhadap pemilihan legislatif di desa kalobba kecamatan tellulimpoe tahun 2014 ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat khususnya kaum muda dalam partisipasi terhadap pemilihan legislatif desa kalobba kecamatan tellulimpoe priode tahun 2014 – 2018 ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat khususnya kaum mudah terhadap pemilihan legislatif di desa kalobba kecamatan tellulimpoe tahun 2014.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat khususnya kaum mudah dalam partisipasi terhadap pemilihan legislatif desa kalobba kecamatan tellulimpoe priode tahun 2014 – 2018.

1. Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pengembangan teori ilmu politik, khususnya partisipasi politik.

- b. Penelitian ini diharapkan sehingga dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya.

2. *Praktisi*

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas tentang perilaku politik dalam pembangunan perpolitikan di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman para aktor politik tentang partisipasi politik yang terjadi di Indonesia khususnya desa kalobba kecamatan tellulimpoe.

D. *Telaah pustaka*

Telaah pustaka merupakan suatu hal yang memuat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari duplikasi, disamping itu, untuk menunjukkan bahwa topik yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain dalam konteks yang sama serta menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Dengan kata lain tinjauan pustaka bertujuan untuk meletakkan posisi penelitian diantara penelitian – penelitian yang telah ada studi tentang partisipasi politik sudah banyak diterbitkan dan ditemukan, namun sampai saat ini belum ada yang membahas tentang partisipasi politik dalam pilihan legislative di kecamatan tellulimpoe desa kalobba. Selain itu, lokasi dan tempat penelitian berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah ada. Adapun beberapa buku referensi dan karya ilmiah yang berkaitan dengan partisipasi politik adalah: Prof.DR.Kacung Marijan dalam bukunya berjudul system

politik Indonesia yang menjelaskan tentang konsep kekuasaan pada masa orde baru yang mengarah pada perubahan-perubahan kerangka kelembagaan lainnya, seperti adanya system multi- partai, pelaksanaan pemilu yang relative dan demokratis, adanya pers yang bebas, dan upaya menjadikan birokrasi dan militer sebagai kekuatan professional tetapi netral secara politik. Leo Agustino dalam bukunya⁴ berjudul pilkada dan dinamika politik local yang didalamnya membahas⁵ tentang upaya refleksi dan analisis terhadap politik Indonesia pada masa kontemporer, khususnya dalam konteks pilihan legislative yang dijadikan tulang punggung partisipasi politik diindonesia.

Henry Subiakto dan Rachmah Ida dalam bukunya berjudul Komunikasi politik, Media dan Demokrasi yang didalamnya membahas tentang bahasan fundamental tentang komunikasi/partisipasi politik mulai dari sejarah komunikasi politik, teori dan konsep; hingga teknik dan praktik kegiatan dalam partisipasi politik. DR. H. Inu kencana syafiie, M.Si dalam bukunya yang berjudul pengantar ilmu pemerintahan yang menyatakan bahwa gambaran secara sistematis tentang ilmu pemerintahan, mulai dari sejarahnya secara kronologis, objek yang dibahas baik materi maupun formalnya, teori-teorinya, asas-asasnya teknik-teknikhnya dan metodologinya. Prof. H. Rozali Abdullah. S. H dalam bukunya yang berjudul tentang pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung yang menyatakan bahwa kesatuann partisipasi dalam

⁴Harison Lisa, Metodologi Penelitian Politik (Jakarta PT Fajar Pratama Pres 2007).

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memandang pada asas kesatuan wilayah dan administrasi pemerintahan. Meriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar ilmu politik, membahas tentang konsep-konsep seperti politik, kekuasaan, dan pembuatan keputusan. Meriam budiardjo berpendapat dalam bukunya bahwa ilmu politik adalah ilmu yang dinamis dan berubah secara cepat, dikarenakan objek studi dari ilmu ini adalah manusia.

Rafael Raga Maran dalam politik bukunya yang berjudul pengantar sosiologi politik, Rafael dalam bukunya menyatakan sosiologi politik adalah salah satu cabang sosiologi yang mempelajari dimensi social dan politik. Karena terdiri dari dua kata sosiologi dan politik yang masing-masing mengacu pada bidang kajian tertentu, maka baiklah pengertian kedua kata itu terlebih dahulu diperhatikan.

Sebenarnya masih banyak pustaka yang belum disebut disini, terutama pustaka yang membahas tentang partisipasi politik secara umum. Namun yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan difokuskan dalam penelitian ini, kiranya sudah memadai, sungguh demikian pustaka yang disebut diatas jelas belum ada yang khusus membicarakan partisipasi masyarakat dalam pemilu (pilihan legislatif) adapun tujuan buku ini adalah menyediakan peralatan intelektual dasar untuk menganalisis menafsirkan dan memahami partisipasi masyarakat dalam pilihan legislative yang membicarakan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 pada khususnya didesa kalobba kecamatan tellulimpoe dan bersifat teoritis dan materialis.

E. Kerangka Teori

Bagian ini merupakan unsur yang paling penting dalam penelitian, karena pada bagian ini peneliti mencoba menjelaskan fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitiannya.

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi dalam buku metode penelitian social mengatakan, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena social sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

1. Teori Pilihan Rasional (*Rasional Choice*).

Menurut James S. Coleman adalah teori pilihan rasional yang memusatkan perhatian pada actor dimana actor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud artinya actor mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut, aktorpun dipandang sebagai mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa dalam teori pilihan rasional, setiap individu memiliki maksud serta tujuan tertentu dalam tindakannya,⁶ sehingga untuk mencapai tujuan yang dimaksud ia lebih mengedepankan kepentingannya sendiri dalam menentukan segala hal, ilmu Pengetahuan sangat terbatas dalam kawasan kompetensinya yang disebut kebenaran ilmiah permasalahan abstrak

⁶http://www.refrensi_partisipasi_politik.geogle.com diakses pada tanggal 7 mei pada tanggal 7 mei 2014 pukul 10:57

Dalam uraian lain juga dijelaskan oleh James Bhucanan yang telah melahirkan disiplin ilmu ekonomi politik karena memasukkan unsur-unsur pertimbangan ekonomis dalam perilaku para politikus yang kemudian dikenal sebagai “Teori pilihan rasional” (*Rasional Choise*).

Dengan makna lain teori ini bisa juga dikatakan sebagai teori yang berkaitan dengan pendekatan ekonomi karena setiap pelaku atau actor maupun masyarakat tertentu memberikan pilihan-pilihannya dalam fenomena politik didasarkan pada *Cost-benefit* dimana bentuk partisipasi masyarakatnya dari apa yang dipilih menjadi prioritas utama dalam memilih, misalnya dalam fenomena politik yang terjadi di Indonesia saat ini, seperti pemilihan umum legislative maupun eksekutif.

Ketika seseorang akan memilih kandidat saat kampanye berlangsung, anggota kampanye memiliki pilihan-pilihan tertentu terhadap seorang pemimpin yang akan ia pilih tahun berikutnya, selain membuka ruang bagi adanya system multipartai dan pemilu yang bebas dan adil, upaya membangun relasi yang lebih baik antara wakil dan terwakil dan partisipasi public dilakukan melalui desain kelembagaan lain diantaranya ia akan mengetahui resiko serta keuntungan seperti apakah yang kelak ia dapatkan jika ia memilih kandidat A atau B dan sebagainya. Misalnya dari 550 anggota DPR yang murni terpilih

berdasarkan BPP hanya 2016 orang, mereka⁷ terdiri dari Golkar 88, PDI-P 63, PLB 29, PKS 13, PD 9. Ketika sisa perolehan suara dihitung masing-masing memperoleh tambahan.

2. *Teori Prilaku Pemilih*

Prilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum teori tentang partisipasi masyarakat memilih dikategorikan kedalam dua kubu yaitu; partisipasi politik bersinggungan erat dengan control atau pengawasan politik, ini hal yang kedua, karena itu control politik akan sangat baik bila hal ini dilaksanakan bukan hanya orang-orang yang berada dalam struktur kekuasaan, tetapi juga oleh mereka yang berada diluar struktur pemerintahan (Check and balances dalam pengertian yang luas). Kemajuan suatu bangsa saat ini, tidak lagi ditentukan oleh peran state saja, tetapi juga amat dipengaruhi oleh interaksi antara: *state –market – civil society*. Oleh sebab itu, usaha saling control guna pengelolaan kehidupan kearah yang lebih baik menjadi kebutuhan dalam merealisasikan system pemerintahan yang demokratis.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat pada setiap indifidu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong indifidu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap

⁷http://www.refrensi_partisipasi_politik.geogle.com diakses pada tanggal 7 mei 2014 pukul 10 :57

pertanggungjawaban bersama sedangkan partisipasi politik didefinisikan sebagai berikut.

Kegiatan warga Negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Namun demikian didapati tingkatan hierarki partisipasi politik yang berbeda dari suatu system politik dengan yang lain, tetapi partisipasi pada suatu tingkatan hierarki tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada suatu tingkatan yang lebih tinggi. Disamping itu pentingnya partisipasinya berbeda-beda dalam suatu system politik dengan system politik lain, lagi pula berbeda dalam suatu system politik dengan system politik lain, lagi pula dalam suatu system dalam waktunya. Gambar berikut ini menunjukkan hierarki yang menyangkut seluruh jajaran partisipasi politik, yang gunanya untuk diterapkan pada semua system pemerintahan. Missal menduduki jabatan politik atau administrasi – mencari jabatan politik atau administrasif – keanggotaan aktif suatu organisasi politik – keanggotaan pasif suatu organisasi politik – keanggotaan aktif suatu organisasi semua politik – keanggotaan pasif – suatu organisasi semua politik – partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan umum dalam politik – partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik – pemberian suara. Jadi akan terdapat berbagai pembatasan pada partisipasi politik, beberapa dari pembatasan ini ada yang formal dan informal. Menurut Mazhab Columbia dan Mazhab Michigan Mazhab

Columbia menekankan pada factor sosiologis dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Model ini melihat Masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok yang bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah hingga yang teratas. Penganut pendekatan ini percaya bahwa masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar social yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama., kelas, pekerjaan, umur, jenis kelamin dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Jenderal Chun Doo Hwan tidak tinggal diam melihat pergolakan politik yang semakin membesardan bergelombang.

Ia tahu bahwa dirinya bahwa dirinya tidak diinginkan oleh mayoritas warga masyarakat, maka dia mengambil siasat dengan mempersiapkan kadernya, Roh Tae Woo, untuk menggantikan dirinya. Pemilih diartikan sebagai pihak atau individu yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mempengaruhi mereka dan meyakinkan⁸ mereka agar mendukung dan memilih pasangan calon dalam lembaga politik yang bersangkutan. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa perilaku pemilih yang demikian rupanya hampir sama dengan partisipasi dukungan supporter.

Inilah menjadi permasalahan ketika banyaknya pemilih yang cenderung berpartisipasi politiknya termanifestasi pada satu poin

⁸http://www.refrensi_partisipasi_politik.geogle.com diakses pada tanggal 7 mei 2014 pukul 10 :57

tertentu, bisa itu karena adanya suatu keterkaitan sipemilih dengan sicalon atau kandidat.

3. *Teori partisipasi*

Partisipasi public pada dasarnya merupakan bagian dari partisipasi pada umumnya menurut para ahli yaitu Charles Andrain dan James smith mengelompokkan tiga bentuk partisipasi, pertama adalah partisipasi yang lebih pasif. Didalam tipe pertama ini, partisipasi dilihat dari keterlibatan politik seseorang, yakni sejauh mana orang itu melihat politik sebagai sesuatu yang penting, memiliki minat terhadap politik dan sering berdiskusi mengenai isu – isu politik dengan teman.

Kedua adalah partisipasi yang lebih aktif, yang menjadi perhatian adalah sejauh mana orang itu terlibat didalam organisasi – organisasi atau asosiasi – asosiasi sukarela seperti kelompok – kelompok keagamaan, olahraga, pecinta lingkungan, organisasi profesi, dan organisasi buruh. Ketiga adalah partisipasi yang berupa kegiatan – kegiatan protes seperti ikut menandatangani petisi, melakukan boikot, dan demonstrasi.

Dalam kategori semacam itu partisipasi public memang tidak secara khusus bisa masuk kedalam salah satu dari tiga kategori seperti yang telah disinggung didepan, partisipasi public acap kali lebih ditekankan pada proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan public, seperti terlibat dalam pertemuan – pertemuan public, melakukan inisiatif dan referendum.

Dalam konteks demikian, walaupun ditempatkan didalam tiga kategori itu, partisipasi public lebih dekat menjadi bagian dari partisipasi dalam kategori kedua. Dapat dianalisis dengan dua pendekatan dari tiga pendekatan adalah sebagai berikut;

a. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini menggunakan konsep psikologis terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variable – variable itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku pemilih kalau ada proses sosialisasinya. Oleh karena itu menurut pendekatan ini sosialisasi sebenarnya menentukan perilaku politik seseorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik tidak jarang sama sama dengan pilihan politik orang tuanya. Pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu – isu dan orientasi kepada kandidat.

b. Pendekatan rasional

Dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih kandidat yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses pemilu. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi dan dihitung ekonomi. Merujuk pada kenyataan saat ini dimana politik local menggambarkan banyak hal tentang politik

serbaneka, maka tidak boleh tidak bahwa pilkada menjadi sumbangsih tersendiri bagi upaya kita untuk memahami politik dalam arti yang lebih luas. Dengan menggunakan asumsi – asumsi umum yang sering kita dengar, salah satunya Briant Smit (1985), yang mengatakan bahwa pemilihan langsung *local goferment heads dan local represintatife council* adalah salah satu persyaratan bagi terwujudnya pemilihan legislative yang akuntabel dan responsive, serta terbangunnya *political equality* di tingkat local.

pemilihan legislatif (pilkada) yang telah dimulai pada tanggal 9 april priode 2014 - 2018 kemarin tidak mungkin tidak, akan membawa perubahan kearah demokratisasi.

Jika demikian kita akan memahai bahwa, setidaknya dalam makna yang sederhana, Kenyataan lapangan seringkali tidak sesuai dengan terapan teoretik seperti diatas.⁹

Demokratisasi yang mustinya terbangun pasca – Pilkada seringkali terkianati oleh prilaku actor politik yang memanfaatkan momen pemilihan kepala daerah da sebagai arena bisnis.

Tapi permasalahannya dalam iklim demokrasi liberal prilaku actor tidak boleh diinterfensi oleh kekuatan manapun dan apapun. Karena setiap indifidu memiliki kebebasan dalam bertindak.

c. Pendekatan sosiologis

⁹Harison Lisa, metodologi penelitian politik (Jakarta PT fajar Pratama Pres 2007); Halaman 104

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik social dan pengelompokan social mempunyai pengaruh – pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku politik seseorang. Karakteristik social seperti pekerjaan, pendidikan sampai karakteristik sosiologis seperti agama, wilayah jenis kelamin, umur dan sebagainya merupakan bagian – bagian dan factor – factor penting dalam menentukan pilihan politik.

pengelompokan social seperti umur, jenis kelamin, agama dan sebagainya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan seseorang. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang pendekatan sosiologis melihat bahwa dalam kelompok – kelompok social, terdapat kognisi social tertentu yang pada akhirnya bermuara pada perilaku dan pilihan tertentu, dalam kelompok – kelompok social, berlangsung melalui proses sosialisasi.

Lingkungan social memberikan bentuk – bentuk sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma dalam masyarakat, serta memberikan pengalaman hidup.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana penulis mencoba untuk meneliti atau menganalisa dengan mencoba memberikan gambaran

dan penjelasan mengenai kenyataan empiris yang dijadikan objek penelitian.

2. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

Pentuan subjek penelitian hendaknya menggunakan suatu criteria tertentu. Peneliti juga perlu menjelaskan dari mana ia mulai mengumpulkan data, siapa yang menjadi informan kunci, penjelasan jika peneliti menambah sampel dan bilamana penambahan sampel dianggap cukup.

Adapun yang akan menjadi informan disini adalah :

1. Kepala desa
2. Pemilih (masyarakat)
3. Kaum Muda

Objek penelitian adalah focus yang akan dicari jawabannya melalui peneliti. Objek peneliti harus dirumuskan secara tajam dan jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan – kesalahan bagi orang lain.

Adapun informan diatas adalah mereka yang banyak mengetahui dunia perpolitikan yang terjadi didesa kalobba kecamatan tellulimpoe, khususnya desakalobba kecamatan tellulimpoe, agar data yang didapatkan lebih valid atau lebih actual (terpercaya), dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana penulis mencoba untuk meneliti atau

menganalisa dengan mencoba memberikan gambaran dan penjelasan mengenai kenyataan empiris yang dijadikan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian social merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala social tersebut, dengan jalan menganalisisnya.

Juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta social tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan, Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapat dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui :

a. Metode Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relative lama, menurut Richard (1996) menilai manfaat mewawancarai kelompok masyarakat berdasarkan kelebihan dan kekurangannya.

Kelebihan pada suatu masyarakat elit mereka mungkin membantu menginterpretasikan dokumen dan laporan terutama jika kita mewawancarai masyarakat. Dalam kasus wawancara terstandarisasi, kita mengajukan pertanyaan dengan cara yang sama, ini pada prinsipnya sama dengan survei.

b. Metode Observasi

Metode ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan setiap objek material dari suatu disiplin ilmu.

dapat sama dengan objek materi ilmu pengetahuan lain karena bersifat umum dan merupakan topik yang dibahas secara global tentang pokok persoalan.

Dengan tujuan mendapatkan gambaran yang benar tentang suatu gejala social atau peristiwa tertentu yang ada dan terjadi pada suatu lokasi dalam suatu daerah. Adapun sumber data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan menggunakan:

1) Metode Dokumenter

Metode ini adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian social. Yang pada intinya metode ini digunakan untuk menelusuri data histori, dan social.

Yang sebagian besar fakta data social tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, seperti buku-buku, literature, arsip atau dokumen pemerintah.

2) Metode Online

Metode pengumpulan data online adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi online yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

c. Metode Analisis Data

Problema umum dalam suatu penelitian secara praktis dan akademis kita dapat juga mengetahui informasi berdasarkan pertanyaan dalam mengambil pandangan dengan bersikap terbuka dan jujur dalam hal tujuan penelitian lapangan dengan mengambil data sekunder.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dari hasil wawancara, penelitian akan mendeskripsikan dan menganalisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi empat bab masing-masing dirincikan menjadi beberapa sub bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang letak geografis desa kalobba kecamatan tellulimpoe, gambaran umum pilihan legislatif di desa kalobba, bab

ketiga hasil penelitian, pada bab ini akan membahas tentang factor-faktor yang memengaruhi masyarakat terhadap pilihan legislative didesa kalobba kecamatan tellulimpoe, partisipasi politik masyarakat kecamatan tellulimpoe dalam pilihan legislative dan partisipasi politik kaum elit didesa kalobba kecamatan tellulimpoe. Bab keempat penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup¹⁰, dan membahas tentang langkah – langkah metode dalam penelitian yang dituang dalam pembahasan selanjutnya.

Ketika kita melihat dan membaca tentang peristiwa – peristiwa politik dalam kehidupan sehari – hari akan dibanjiri oleh sederetan fakta, sudut pandang atau menerima beberapa informasi serta mempertanyakan informasi lainnya, di dalam bab ini akan membahas beberapa isu dan perhatian yang harus kita pertimbangkan saat melakukan analisis politik sifat subjektif dari hal – hal yang di temukan akan menjadi lebih kompleks dan jelas.

melakukan wawancara yang menggabungkan pertanyaan – pertanyaan (usia, jender) namun bisa mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini apabila pewawancara meminta penjelasan dan elaborasi jawaban, selama proses wawancara dapat dilakukan dalam penelitian.

Informan dan pewawancara yang disebut sebagai wawancara informal, focus, tak terstruktur atau bebas, wawancara jenis ini dilakukan dalam bentuk percakapan yang mengalir bebas bergantung pada kualitas

¹⁰Harison Lisa, metodologi penelitian politik (Jakarta PT fajar pratama pres 2007

interaksi social antara pewawancara dan informan yang dapat diluruskan kembali oleh pewawancara jika percakapan menjadi menyimpang dari judul yang akan di teliti di lapangan yang bertujuan mendapatkan data yang lebih jelas dan mendetail melalui struktur informan/ pewawancara



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai mempunyai nilai historis tersendiri, dibanding dengan kabupaten - kabupaten yang ada diprofinsi Sulawesi selatan merupakan daerah pegunungan yang mempunyai daerah perbatasan Sinjai, Bulukumba terbagi beberapa desa yang ada diprofinsi Sulawesi Selatan kecamatan tellulimpoe salah satu daerah pemilihan dalam ruang lingkup desa dari banyaknya desa.

Dulu terdiri dari beberapa kerajaan - kerajaan, seperti kerajaan yang tergabung dalam federasi tellulimpoe dan kerajaan - kerajaan yang tergabung dalam federasi pitu limpoe.

Tellulimpoe terdiri dari kerajaan yang berada dekat pesisir pantai yakni kerajaan Tondong, Bulu - Bulu dan Lamatti, serta Pitulimpoe adalah Kerajaan - Kerajaan yang berada didaratan tinggi yakni kerajaan Turungen, Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Bala Suka.

Watak dan karakter masyarakat tercermin dari system pemerintahan demokratis dan berkedaulatan rakyat, komunikasi politik diantara kerajaan - kerajaan dibangun melalui landasan tatanan kesopanan yakni sipakatau artinya saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai - nilai konsep; sirui menre tessirui no' yakni¹¹ saling

¹¹<http://www.sinjaikab.go.id>, diakses pada tanggal 5 agustus 2014

menarik keatas' pantang saling menarik kebawah' mallilu sipakainge yang bermakna bila khilaf saling mengingatkan¹².

Sekalipun dari ketiga kerajaan tersebut tergabung kedalam persekutuan kerajaan Tellu Limpoe namun pelaksanaan roda pemerintahan tetap berjalan pada wilayahnya masing – masing tanpa ada pertentangan dan peperangan yang terjadi diantara mereka.

Bila ditelusuri hubungan antara kerajaan - kerajaan yang ada dikabupaten sinjai dimasa lalu, maka nampaklah dengan jelas bahwa ia terjalin dengan erat oleh tali kekeluargaan yang dalam bahasa bugis disebut Sijai artinya sama jahitannya.

Hal ini diperjelas dengan adanya gagasan dari *lamassiajeng* Raja lamatti x untuk memperkokoh bersatunya antara kerajaan Bulu - Bulu dan lamatti dengan ungkapnya; Passija Singkerunna Lamatti Bulu - Bulu' artinya satukan keyakinan Lamatti dengan Bulu – Bulu sehingga setelah meninggal dunia beliau digelar dengan Puanta Matinroe Risijainna.

Eksistensi dan identitas kerajaan - kerajaan yang ada di Kabupaten Sinjai dimasa lalu semakin jelas dengan didirikannya Benteng pada tahun 155, Benteng ini dikenal dengan nama Benteng Balannipa, sebab didirikannya di Balangnipa yang sekarang menjadi Ibu Kota Kabupaten Sinjai.

¹²<http://www.sinjaikab.go.id>, diakses pada tanggal 5 agustus 2014

Disamping itu Benteng inipun diKenal dengan nama Benteng Tellulimpoe, karena didirikannya secara bersama - sama oleh tiga kerajaan yakni lamatti, Bulu - Bulu dan Tondong lalu dipugar oleh belanda melalui Perang Manggarabombang.

Tahun 1636 orang Belanda mulai datang ke daerah Sinjai, Kerajaan - Kerajaan di Sinjai menentang keras upaya Belanda untuk mengadu domba menentang keras upaya Belanda untuk memecah belah persatuan Kerajaan - Kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan.

Hal ini mencapai puncaknya dengan terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap orang - orang Belanda yang mencoba membujuk kerajaan Bulu - Bulu untuk melakukan peran terhadap kerajaan Gowa, dengan peristiwa ini terjadi tahun 1639.

Hal ini disebabkan oleh Rakyat Sinjai tetap berpegang teguh pada perjanjian *To Pekkong*, tahun 1824 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Vander Kapellan datang dari Batavia untuk membujuk Arung Bulu - Bulu XXI agar menerima perjanjian Bongayya dan mengizinkan Belanda Mendirikan *Loji* atau Kantor Dagang di Lappa tetapi ditolak dengan tegas, setelah terjadinya permusuhan di Kabupaten sinjai yang merupakan peninggalan sejarah pada Tahun 1936 yang disebut Benteng Balannipa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Dan Daerah, takluknya wilayah Tellulimpoe dan Sinjai dijadikan satu wilayah pemerintahan dengan sebutan Goster Distrikten¹³

¹³<http://www.sinjaikab.go.id>, diakses pada tanggal 1 Agustus Tahun 2014

Tanggal 24 Pebruari 1940 gubernur Grote Gost menetapkan pembagian¹⁴ administrative untuk daerah timur termasuk residensi Clebes dimana sinjai bersama - sama beberapa kabupaten lainnya berstatus sebagai *Onther Afdelling* Sinjai terdiri dari beberapa Adat Gemenchap, yaitu Cost Bulu - Bulu, Tondong, Manimpahoi, Lamatti West, Manipi dan Turungeng.

Pada masa pendudukan jepang, struktur pemerintahan dan namanya ditata sesuai dengan Kebutuhan Bala Tentara Jepang yang bermarkas di Gojeng setelah Proklamasi kemerdekaan 1945 yakni Tanggal 20 Oktober 1959 Sinjai resmi menjadi sebuah Kabupaten berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 29 Tahun 1959.

B. Letak Geografis Desa Kalobba

Desa Kalobba sebuah desa binaan ukhuwah islamiah yang memegang satu dasar Agama yakni penduduk rata - rata meyakini adanya agama islam dan dua landasan agama yakni NU, MUI salah satu cabang MUHAMMADIYAH yang merupakan pemerintahan yang diresmikan oleh Kementrian Agama RI kerja sama dengan Instansi pemerintahan setempat di Kabupaten sinjai Selatan merupakan Daerah pegunungan di Luar kabupaten Sinjai termasuk salah satu Cabang Instansi pusat Pemerintahan yang memiliki Birokrasi yang sangat matang terhadap Pembangunan dalam pemanasan global secara bertahap yang ada di Profinsi Sulawesi Selatan memiliki lebih dari beberapa penduduk

di Desa kalobba sebagai Daerah Pemilihan yang terbagi beberapa TPS dari banyaknya Dusun di Desa kalobba terkait dengan batas Wilayah tertentu memiliki Batas - Batas dari selang pandang kecamatan berdasarkan Batas - Batas Desa dan kelurahan.

Didesa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe pada dasarnya tidak memiliki Kelurahan terbagi menjadi beberapa Dusun memiliki karakter Daerah pemilihan dan memiliki mata pencaharian yang cukup termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan yang beriklim tropis, Iklim tropis masing – masing desa dari beberapa Dusun dengan Skala Peta 1:500.000 lintang Selatan dengan rincian 118 – 119 Bujur Timur dari garis Khatulistiwa disamping itu mata pencaharian pada bidang perikanan, peternakan, dan perkebunan.

Desa kalobba sebagian termasuk TPS dan PPS memiliki masing - masing KTP dengan jumlah Daftar pemilih Tetap 2260 terbagi dalam wajib pilih laki – laki dengan jumlah pemilih 1269, perempuan dengan jumlah pemilih 1386 yang memilih terbagi berdasarkan jenis kelaminnya dari jumlah pemilih Laki – Laki 866 dan Perempuan 1026 dengan jumlah TPS 1892 orang dari banyaknya jumlah Penduduk pada khususnya.

Letak Geografis merupakan letak yang membatasi daerah Pegunungan, Lautan dan Daratan yang dibatasi oleh dua Benua yakni Benua Asia dan Benua Australia dan dua Samudera yakni Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik berada di kelurahan mannanti, talah

disimak kembali bahwa Desa Kalobba merupakan Desa binaan yang memegang prinsip Ukhuwah islamiyah yang bermakna persaudaraan dan persatuan dalam tali Agama Islam yang telah ditentukan oleh Kementrian Agama RI¹⁵ yakni NU dan MUHAMMADIYAH yang telah diyakininya di Desa kalobba Kecamatan Tellulimpoe memiliki Daerah pemilihan TPS 1 sampai dengan TPS 7 Sebelah Utara Desa Saotengah merupakan ujung perbatasan Sinjai - Kabupaten Bulukumba sebelah Utara Desa Saotengah, Sebelah Selatan Kabupaten Bulukumba, Sebelah Timur Kelurahan Mannanti dan Sebelah Barat Desa Samaturue dengan Keterangan Sketsa Peta Wilayah PPS Masjid, Sekolah, dan lokasi TPS.

Batas – batas Wilayah merupakan letak Wilayah yang dibatasi oleh Pegunungan dan Lautan berdasarkan garis Khatulistiwa dengan Skala 1:500000 laut Indonesia dalam Wilayah Desa Kalobba yang merupakan Daerah pemilihan terbagi dibeberapa dusun yakni TPS 1 dan TPS 2, TPS 7 Dusun Toribi, TPS 3 Dusun Attirongnge, TPS 4 berbatasan dengan TPS 6 Dusun Kambuno, TPS 5 Dusun Sumpang Ale dan Dusun Borong Ampirie memiliki sarana prasarana pendidikan di masing - masing desa terbagi beberapa dusun dan terdapat juga pusat kajian Agama yang dikenal pusat kajian Darul Istiqamah, disamping itu Desa Kalobba memiliki kebudayaan tersendiri yakni dari segi Adat – Istiadat sebagian memiliki Adat – Istiadat yang berbasis Agama diapit oleh Adat Hijriah.

¹⁵Hasil penelitian lapangan pada tanggal 11 Juni sampai 9 Agustus 2014 di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe.

Budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi dan daya berarti karsa dan rasa kata Budaya sebenarnya berasal dari bahasa *sansekerta budhaya* yaitu bentuk jamak kata Budhii berarti akal atau Rasio memiliki karakteristik Masyarakat dalam pemilihan Legislatif Tahun 2014.

Pemilihan legislative merupakan bagian dari pemilihan kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dan pemilihan Legislatif Tahun 2014 yang akan dielaborasi secara bergantian yang memiliki syarat - syarat pencalonan anggota legislative di Masing - Masing TPS, Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dijadikan patokan dalam Pemilihan Legislatif Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan konsekuensi dari tuntutan Demokratis yang dilakukan dalam era Reformasi dalam rangka memimpin di Daerah yang benar – benar sesuai harapan Masyarakat Luas.

Pencalonan Pemilihan Legislatif mekanismenya adalah diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik secara berpasangan dengan catatan harus memenuhi persyaratan perolehan sekurang - kurangnya 15 Persen dari jumlah kursi DPRD Kabupaten atau 5 Persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan Legislatif dan anggota DPRD di Daerah yang bersangkutan.

Juga melalui jalur perseorangan independen yang jumlah Pendukungnya bisa ditunjukkan melalui KTP sebagai Identitas pemilih.

Calon Legislatif merupakan salah satu Calon yang merupakan kombinasi dari Pilgub (Pilihan Gubernur) yang diajukan oleh Partai

Politik maupun gabungan Partai Politik harus memenuhi syarat – syarat¹⁶ Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang - Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Cita - Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan RI serta Pemerintah, Berpendidikan sekurang - kurangnya berusia 30 Tahun keatas¹⁷.

Disamping Formulir - Formulir tersebut diatas para Calon Legislatif salah satu pokok dalam pandangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah diwajibkan memasukkan Surat Keterangan Domisili (KTP), seluruh ijazah SD, SMP sampai minimal SLTA yang sudah dilegalisir, Surat Keterangan Kenal Lahir (Akta Kelahiran), Naskah visi misi, Daftar nama - nama Tim Kampanye, Rekening Kampnye, Nomor NPWP, serta pasphoto ukuran 4 kali 3 sesuai dengan kebutuhan.

Mekanisme pendaftaran Calon Legislatif dilakukan dikantor Komisi Pemilihan Umum setelah dilakukan Jadwal Pendaftaran Calon kepada Partai Politik dan gabungan Partai Politik.

Pendaftaran Calon baik yang diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau Perseorangan setelah diterima Pemilihan Umum bersama seluruh Persyaratan - Persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

¹⁶Leo Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal: refleksi dan analisis terhadap politik diindonesia masa kontemporer (cetakan ke – 1, Yogyakarta: penerbit pustaka pelajar.cet. 2009) hal 95 - 99

Persyaratan tersebut diatas harus dipenuhi oleh Calon Legislatif disertai dengan Kelengkapan - Kelengkapan persyaratan Administrasi lainnya, yang selanjutnya akan diteliti oleh Komisi Pemilihan Profinsi Sinjai Selatan, jika ada persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi Calon Legislatif maka komisi Pemilihan Umum Profinsi akan memberitahukan kepada Partai atau gabungan Partai perseorangan atau Partai Pengusung atau Calon perseorangan tersebut.

Penelitian administratif Calon Legislatif Tahun 2014 dalam Pemilu sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 43 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa penelitian Pasangan Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan Administrasi Pencalonan serta klarifikasi pada Instansi yang berwenang memberikan Surat Keterangan.

Dalam hal Penelitian pasangan Calon, masyarakat dapat memberikan masukan kepada KPUD Mengenai Penelitian yang berkaitan dengan syarat - syarat Calon dan apabila ada masukan dari Masyarakat tentang keabsahan pasangan Calon, maka Komisi Pemilihan Umum wajib memproses masukan tersebut dan menyampaikan atau memberitahukan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan pasang Calon.

Penelitian keabsahan administrasi pasangan Calon dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan langsung mengklarifikasi seluruh administrasi calon di Lapangan. Hal ini dilakukan demi untuk

mengantisipasi masuknya administrasi kelengkapan yang tidak sesuai dengan aslinya

Adapun administrasi persyaratan Calon yang diklarifikasi Komisi Pemilihan Umum adalah tentang keaslian Ijazah Calon dari Menengah¹⁸ Pertama sampai Perguruan Tinggi; Pasangan Calon Legislatif yang mengikuti pendidikan didalam Daerah maupun di luar Daerah yang di klarifikasi dan keaslian Ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) mereka di masing – masing pasangan Calon.

Setelah dilakukan penelitian klarifikasi keabsahan seluruh administrasi pasangan Calon legislative serta menampung masukan – masukan dari Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan kepemimpinan Partai pengusung pasangan Calon atau Calon perseorangan untuk segera menjawab atau mengklarifikasi hal – hal yang dianggap perlu memperoleh penjelasan.

Jika administrasi persyaratan Calon sudah dianggap legal dan lengkap, KPUD melakukan Rapat Pleno tentang penetapan Calon Legislatif dimasing – masing Daerah. Setelah persyaratan administrasi maupun keabsahannya benar – benar dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan, Komisi Pemilihan Umum Daerah menetapkan dan melakukan Rapat pengundian nomor urut Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam pemilihan Legislatif yang dilakukan secara bertahap.

¹⁸Leo Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal: refleksi dan analisis terhadap politik diindonesia masa kontemporer (cetakan ke – 1, Yogyakarta: penerbit pustaka pelajar.cet. 2009) hal.99 - 100

Proses pengundian nomor urut Calon merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghadirkan tim pengusung maupun tim Kampanye.

C. Gambaran Umum Pileg Desa Kalobba Kec. Tellulimpoe

Keterkaitan antara system pemilu dan stabilitas Pemerintahan merupakan salah satu topic yang sering diperbincangkan oleh para Ilmuwan Politik. Perbincangannya khususnya berkaitan dengan perbandingan system Pemilu yang seperti apakah yang cenderung menghasilkan pemerintahan yang stabil.

Dari penjelasan diatas sudah diterangkan bahwa letak Geografis desa kalobba sesuai dengan skala peta 118 sampai dengan 119 derajat dari garis Khatulistiwa sebelah Selatan Kabupaten Bulukumba berbatasan di Sebelah Barat Desa Samaturue, Sebelah Timur Kelurahan Mannanti dan Sebelah Utara Saotengah sebagai Lokasi Pemilihan Legislatif yang terdiri dari 7 TPS terbagi beberapa Desa khususnya Desa Kalobba dengan keterangan Sketsa Peta Wilayah PPS Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Masjid, Sekolah dan lokasi TPS, dengan Daftar pemilih Tetap di Desa Kalobba terdiri dari 2635 dengan Wajib Pilih Laki – Laki 1269 Pemilih, Perempuan 1026 Pemilih dengan jumlah TPS 1892 pemilih dari Survei yang kami teliti pada Peta Wilayah PPS di masing – masing Wilayah yang ada di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe.

Dari Batas – Batas Wilayah PPS yang terbagi menjadi beberapa Desa di Sebelah Utara dalam ruang lingkup Kelurahan secara bertahap yakni

TPS 01 Dusun Toribi, TPS 02 Dusun Borong Ampirie, TPS 03¹⁹ Dusun Attirongnge, TPS 04 Dusun Kambuno, TPS 05 Dusun Sumpang²⁰ Ale, TPS 06 Dusun Kambuno dan TPS 07 Dusun Borong Ampirie jadi jumlah TPS khususnya diDesa Kalobba terdiri dari 07 TPS.

Di bawah ini dapat digambarkan bahwa jumlah total daftar Wajib pilih sebanyak 2635 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Total Wajib Pilih di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe

NO	TPS	WAJIB PILIH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	1	175	208	383
2	2	199	215	414
3	3	212	240	452
4	4	209	227	436
5	5	176	187	363
6	6	177	172	349
7	7	121	117	238

Sumber: Panitia Pemungutan suara

Pada Data hasil Penelitian diatas pada Tabel 2.1 di atas dapat diterangkan bahwa jumlah wajib pilih Laki – Laki dan Perempuan memiliki perbandingan Rata – Rata yang sangat tumpang tindih pada tingkat TPS di beberapa Dusun yang ada di Wilayah PPS pada Hari

¹⁹Hasil pendataan lapangan 11 Juni Tahun 2014 di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe.

Jumat Tanggal 11 Bulan April Tahun 2014 pada Tahap Pemilihan Legislatif anggota DPD dan DPR

Pada Tabel 2.2 dapat diterangkan bahwa daftar Pemilih yang hadir per TPS dari Daftar Pemilih Tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daftar Pemilih Tetap yang Hadir per TPS di Desa Kalobba
Kecamatan Tellulimpoe

NO	TPS	PEMILIH YANG HADIR PER TPS		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	1	115	144	259
2	2	132	155	287
3	3	144	188	332
4	4	140	168	308
5	5	126	144	270
6	6	121	135	256
7	7	88	92	180

Sumber: Panitia Pemungutan Suara

Dari gambar 2.2 diatas dapat diterangkan bahwa jumlah Pemilih yang hadir per TPS dengan jumlah total 180 Pemilih dari daftar Pemilih tetap 2635 Pemilih, dari data diatas dapat digambarkan jumlah Rata – Rata pemilih yang hadir per TPS akan tumpang tindih yang hadir sesuai jumlah TPS yang terbagi dalam 07 TPS di beberapa Dusun pada perhitungan rekapitulasi akhir, pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,

DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota disaksikan oleh saksi dari Partai Politik dan saksi dari Calon Anggota DPD, serta diawasi oleh pengawas Pemilu Lapangan menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan umum Anggota DPR Daerah pemilihan Sulawesi Selatan, DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Sinjai selatan. Selain untuk memilih para anggota DPR/D, Pemilu juga dipakai sebagai instrument untuk memilih Pejabat – Pejabat Politik lain, yaitu Dewan perwakilan Daerah (DPD) dan DPR. Untuk pemilihan para anggota DPD, pemilihannya dilakukan secara bersamaan dengan Pemilihan anggota DPRD.

untuk Pemilihan legislatif, dilakukan secara terpisah, hal ini tidak terlepas dari aturan main bahwa calon DPD dan DPR harus diusulkan oleh calon perorangan atau kumpulan calon perorangan yang memiliki perolehan suara tertentu didalam pemilihan anggota Legislatif. Untuk pemilihan DPD, calon tidak didasarkan pada Partai, melainkan perorangan, hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi anggota MPR dari utusan Daerah dan golongan yang sudah dihapuskan.

Tokoh – tokoh Daerah dan tokoh – tokoh Masyarakat nonpartai, memiliki kesempatan menjadi Anggota DPD tanpa harus berafiliasi dengan Partai Politik. Memang pada kenyataannya tidak sedikit aktifis partai kemudian mencalonkan diri menjadi anggota DPD, modusnya adalah mereka mengundurkan diri dari keanggotaan dan kepengurusan partai secara formal, didalam situasi seperti itu adanya control dari para Warga itu

menghadapi masalah yang berkaitan dengan informasi, pemantauan dan penekanan, ke – 3 hal ini merupakan bagian penting didalam partisipasi public, dengan demikian, demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipatoris atau demokrasi langsung bisa langsung mengisi satu sama lain. Keduanya akan memungkinkan terdapatnya pemerintahan yang responsive dan accountable, baik secara vertical maupun horizontal, Negara – Negara yang berproses menuju demokrasi, termasuk Indonesia, berusaha membangun prosedur demokrasi yang memungkinkan terdapatnya pemerintahan yang accountable dan responsible seperti itu. Tetapi, untuk melaksanakan desain Kelembagaan demikian tidaklah mudah. Seperti diuraikan didalam bagian berikut, upaya Indonesia untuk membangun demokrasi Perwakilan masih menghadapi masalah disconnect electoral.

Demokrasi memang di tiap – tiap Pemilihan tidak berhenti khususnya dikota – kota besar pada adanya pemilu yang bebas, yang oleh Hungtington disebut sebagai definisi minimal demokrasi, didalam system perwakilan demokrasi juga menuntut pertanggungjawaban dari para wakil (*representative*) kepada yang diwakili (*represented*), secara esensial sebagaimana dikemukakan oleh Amartya misalnya demokrasi menuntut adanya kesempatan (*opportunity*) kepada semua pihak, termasuk didalamnya adalah adanya kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi didalam proses politik, Diperkecilnya Dapil sendiri memang memungkinkan adanya interaksi.

yang lebih intens antara Wakil dan terwakili, realitas seperti itu²¹ yang membuat perubahan lanjutan desain Pemilihan, sebagaimana terlihat dari UUD Pemilu yang baru No.10 Tahun 2008 besaran Dapil lebih diperkecil (01 – 07) diKecamatan Tellulimpoe. Penentuan Wakil dari Partai yang memperoleh kursipun tidak semata – mata didasarkan pada Nomor urut, calon yang memperoleh suara 30 persen dari BPP memiliki hak Untuk memperoleh Kursi.

Kedua berkaitan dengan relasi pasca Pemilihan yang menjadi instrument utama adalah adanya ruang public yang duduk diDPRD, memperoleh fasilitas setiap 3 kali didalam setahun) untuk melakukan kunjungan kedaerah pemilihannya. Selain itu, model pembuatan dan implementasi kebijakan dari atas sering dianggap tidak sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat local, hal ini terjadi karena kondisi lingkungan, Pasar local, Perusahaan – Perusahaan swasta dan Struktur didaerah, pada sisi penyediaan Barang – Barang dan pelayanan Publik, implikasi dari realitas semacam ini adalah pilkada secara langsung pada akhirnya berproses secara elitis. Untuk ini, Masyarakat cenderung menggunakan kekuatannya melalui *vote by feets* ketika Masyarakat tidak puas dengan Pelayanan Publik yang lebih baik. Dalam bahasa Hirschman Masyarakat bisa menggunakan

²¹Hasil penelitian lapangan pada tanggal 11 Juni sampai 9 Agustus 2014 di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe

²¹Kacun Marijan, Sistem Politik Indonesia: konsolidasi demokrasi pasca orde baru (cetakan ke – 1; Yogyakarta: Prenada Kencana Media Group, cet. 2010) hal. 187

mekanisme *voice dan exit* Masyarakat bisa menggunakan voice untuk menyalurkan aspirasinya melalui jaring aspirasi masyarakat.

Ketika suaranya tidak didengar, mereka bisa keluar misalnya' mengalihkan kebutuhan Barang – Barang yang dan pelayanan publiknya keswasta atau pindah ke Negara lain, dalam Konteks Pemilu mereka bisa memilih politisi atau partai yang dianggap lebih baik. Pemerintahan yang tersentralisasi sering dianggap cenderung menyamaratakan dan mengabaikan keberagaman dalam penyediaan Barang – Barang dan Pelayanan Publik. Efisiensi justru akan muncul manakala cita rasa yang beragam itu menjadi pertimbangan didalam Pemerintahan yang terdesentralisasi, selain itu Pemerintah Daerah mampu melakukan efisiensi pelayanan Publik ini karena Wilayah di Desa Kalobba semakin terbatas konsekuensi dari semua ini adalah bahwa kesejahteraan masyarakat yang Pemerintahannya terdesentralisasi.

Secara konstitusional adanya amandemen memang dimungkinkan sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud Md hal ini tidak lepas dari fakta bahwa UUD 1945 Itu bukan dimaksudkan sebagai konstitusi yang permanen, melainkan sesuatu yang sementara. Hal ini karena apa yang tertera didalamnya masih belum memuaskan sebagai konstitusi yang tertulis, disamping itu unsure – unsure utama didalam konstitusi seperti adanya perlindungan terhadap HAM belum diatur secara ketat argumentasi yang sering dimunculkan adalah bahwa UUD 1945 itu sudah bagus dan bersifat fleksibel secara tepat. Dalam pemilihan

legislative secara langsung modal social memiliki makna yang sangat penting bahkan tidak kalah pentingnya kalau dibandingkan dengan modal politik, melalui modal social yang dimiliki, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih Lebih dari itu melalui pengenalan lebih – lebih yang pengenalan secara fisik dan social berjarak dekat, para pemilih bisa melakukan penilaian apakah pasangan yang ada itu benar – benar layak untuk dipilih atau tidak. Manakala seorang calon dikatakan memiliki modal social berarti calon itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat melainkan juga diberi kepercayaan.

Disamping itu secara Kelembagaan para Wakil juga didorong untuk mengadakan kunjungan secara rutin kedaerah pemilihannya masing – masing baik pada masa reses maupun pada saat hari – hari lain melalui program ini para Wakil rakyat bisa mengetahui pada saat Masyarakat juga bisa menyalurkan aspirasi yang dimilikinya secara langsung, melalui kegiatan semacam itu para Wakil rakyat berusaha memperjuangkan kepentingan dan berupaya menyelesaikan melalui kebijakan – kebijakan yang dibuat bersama – sama pemerintah.

Para wakil rakyat juga bisa menyalurkan jalan pemecahannya melalui institusi – institusi yang terkait. Pileg secara langsung pada akhirnya berproses secara elitis, tidak jauh berbeda dengan Pilkada sebelumnya, yang dimungkinkan terpilih adalah kelompok elit, khususnya kombinasi elite ekonomi, salah satu sumber kekuatan dan kekuasaan otoritas informal adalah investasi – social – ekonomi – politik dimasa lalu. Orang – orang pada

masa orde baru, seperti pejabat tinggi militer atau kepolisian, kepala – kepala daerah, kepala – kepala Dinas, tokoh – tokoh parpol, serta pelaku bisnis yang telah mapan mendominasi kekuatan politik saat ini. Selain itu pemilihan legislative juga terlihat dari kekuasaan DPRD didalam memengaruhi proses pembuatan APBD, secara kelembagaan proses pembuatan APBD harus melibatkan DPRD, karena APBD harus diputuskan secara bersama – sama antara eksekutif dan legislative. Secara politik dan procedural, hal ini memang harus di lakukan agar mekanisme ekstraksi, alokasi dan distribusi sumber – sumber yang ada didalam anggaran itu bisa sebesar mungkin menguntungkan rakyat, dan pelaksanaannya bisa dikontrol dan di pertanggungjawabkan, hanya saja dalam realitasnya, DPRD juga memiliki kepentingan sendiri, yakni mengupayakan agar kegiatan – kegiatan yang di lakukannya memperoleh pembiayaan yang cukup besar.

Pilkada sudah barang tentu memunculkan suatu realitas politik baru bagi Indonesia, salah satu yang paling populer adalah bergesernya pola interaksi antara state dan society, satu diantara karakteristik penting dari perubahan pola state – society relation adalah masyarakat memerankan peran yang teramat sentral baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan kebijakan, kebijakan otonomi daerah sebagaimana terdapat didalam UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 memberi peluang yang lebih baik dalam membangun relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, melalui dua UU tersebut daerah tidak hanya memiliki kewenangan yang lebih besar dibidang administrasi.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Hasil perhitungan suara dari setiap TPS di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Tahun 2014

NO	URAIAN		RINCIAN							
1	DAN PENGGUNAAN HAK PLIH		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	JMLH PINAHAN
A	DATA PEMILIH									
	1.Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT)	Lk	167	172	208	209	176	175	120	1227
		Pr	197	189	249	225	186	171	116	1333
		JML	364	361	457	434	362	346	236	2560
	2.Jumlah pemilih yg terdaftar dalam Pemilih tambahan (DPTb)	Lk	-	-	-	-	-	-	2	2
		Pr	1	2	-	-	-	-	1	4
		JML	1	2	-	-	-	-	3	6
	3.Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih khusus (DPK)	Lk	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pr	-	-	-	-	-	-	-	-
		JML	-	-	-	-	-	-	-	-
4.Pemilih khusus tambahan (DPKTB) pengguna KTP dan KK/	Lk	5	4	-	2	-	1	2	14	
	Pr	6	10	-	3	-	2	6	27	

	nama sejenis lainnya	JML	11	14	-	5	-	3	8	41
	5.Jumlah pemilih (1+2+3+4)	Lk	172	176	208	211	176	176	124	1243
B	DATA PEMILIH									
	1.Pemilih terdaftar dalam daftar	LK	110	128	142	138	126	120	84	848
	pemilih tetap (DPT)	PR	137	143	185	165	144	133	85	992
		JML	247	271	327	303	270	253	169	1840
	2.Jumlah pemilih yg terdaftar dalam	LK	-	-	-	-	-	-	2	2
	Pemilih tambahan (DPTb)	PR	1	2	2	-	-	-	1	6
		JML	1	2	2	-	-	-	3	8
	3.Pemilih terdaftar dalam daftar	LK	-	-	-	-	-	-	-	-
	pemilih khusus (DPK)	PR	-	-	-	-	-	-	-	-
		JML	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.Pemilih khusus tambahan	LK	5	4	2	2	-	1	2	16
	(DPKTB) pengguna KTP dan KK/	PR	6	10	1	3	-	2	6	28

	nama sejenis lainnya	JML	11	14	3	5	-	3	8	44
	5.Jumlah pemilih (1+2+3+4)	LK	115	132	144	140	126	121	88	866
		PR	144	155	188	168	144	135	92	1026
		JML	259	287	332	308	270	256	180	1892

Sumber : Panitia Pemungutan Suara



Dari table 2.3 tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tahapan pemilihan Legislatif 2014 pada data pemilih dan penggunaan hak pilih dapat diterangkan bahwa Rincian dari uraian beberapa TPS yang ada dimasing – masing desa khususnya diDesa Kalobba memiliki kesetaraan yang tidak seimbang dengan jumlah perolehan suara diTPS menunjukkan jumlah pindahan pada penggunaan hak pilih sebanyak 2560, dengan data pemilih sebanyak 1892 sesuai Data Pemilih dengan pemilih terdaftar dan daftar pemilih tetap (DPT) dengan jumlah total pindahan pada daftar pemilih tetap sebanyak 1243 : 1892 menunjukkan jumlah suara pada rekapitulasi suara tahap akhir jumlah perolehan suara yang memenuhi syarat sesuai dengan KK dan KTP dengan perbandingan perolehan suara sangat maksimal dalam data pemilih tetap dan pemilih khusus.

Sebagai konsekuensi dari dipakainya system pemilu proporsional, sebenarnya peran control terhadap Wakil Rakyat itu bisa dilakukan oleh partai tetapi mekanisme terhadap perkembangan wakil Rakyat itu bisa dipakai melalui data pemilih yang duduk dikursi DPD Provinsi memiliki jumlah perolehan suara secara maksimal. Pemilihan legislative pada digelar keempat pesta demokrasi digelar di era reformasi semua survey memprediksi pemenang pileg Tahun ini kembali bergeser dimasing – masing TPS khususnya diDesa Kalobba dimasing – masing desa pada umumnya yang bertanggungjawab dalam ketentraman dan kemiliteran merangkap sebagai hasil pemilihan.

Dalam pandangan seperti itu, keterlibatan Warga dalam proses politik yang lebih banyak berhenti pada proses pemilihan, proses perumusan kebijakan - kebijakan public lebih banyak menjadi arena tugas para Wakil dan terwakili, pentingnya partisipasi publik dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan – kebijakan public didalam *direct demokrasi* dan *participatory democracy* sering kali dikaitkan dengan realitas tentang penurunan pandangan bahwa para Wakil dilembaga – lembaga perwakilan politik sesuai dengan fungsinya menurut pandangan demikian terlihat dari menurunnya tingkat kepercayaan dari terwakil kepada para wakil yang terjadi di beberapa Desa.

Pelaksanaan Pileg langsung lahir merupakan koreksi terhadap pelaksanaan Pilkada melalui perwakilan, lahirnya undang – undang baru No 12 Tahun 2008 ini merupakan perkembangan dari hasil dialektis dan masukan berbagai elemen masyarakat termasuk kelompok ditingkat grass roots, kedalam proses politik yang lebih langsung yang membedakan dengan pendekatan infusing representative with participatory democracy adalah bahwa pendekatan keempat ditempuh tidak melalui wakil – wakil dari komunitas melainkan dari para anggota berbagai komunitas yang ada. Perbaikan atas kondisi ini tentunya tidak dapat dilakukan dengan cara *shortcut*, melainkan lebih mendasar, seperti pendidikan politik bagi Warga, mengembangkan organisasi – organisasi berbasis Masyarakat sipil, serta terus menerus menumbuhkan *political engagement* masyarakat.

Tabel 2.4
Potensi dan Jumlah Penduduk Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe

NAMA KEP DUSUN	IMAM DUSUN	JUMLAH		JML KK	LUAS Ha	PENGUNAAN TANAH (Ha)					TERNAK				
		RW	RT			PERUMAHAN	SAWAH	KEBUN	HUTAN	LADANG	SAPI	KERBAU	KUDA	KAMBING	BEBER
SAPPE RASAK	ABD SOLLE	2	4	246	358,10	21,10	80,80	233,14	803,95	23,812					
SAHRUDDIN	H.AMIRULLAH	2	4	205	332,30	23,05	91,79	211,15	90,37	22,013					
SUDDING	KHAERUDDIN	1	3	141	435,70	35,16	65,48	142,38		29,410					
M.ARNO KAHAR	TONTI	2	4	318	671,30	39,20	67,68	326,45	160,15	74,100					
H.BACO	MUH KAMIL	1	3	203	372,40	20,09	21,30	160,90	80,77	40,395					
JUMLAH		8	18	1113	2180,80	138,60	335,60	1.047,02	421,625	189,730	1232	3	1		

Sumber: Panitia Pemungutan Suara

JUMLAH PENDUDUK DESA KALOBBA

NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK			TAMBAHAN			PENGURANGAN			JUMLAH		
	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
TORIBI	476	478	954	2		2				478	478	956
BORONG AMPIRIE	402	422	824							403	422	825
ATTIRONGNGE	283	290	573		1	1				283	291	574
KAMBUNO	576	584	1160					4		576	580	1156
SUMPANG ALE	358	378	736	1		1				359	378	737
JUMLAH	2095	2152	4247	3	1	4		4		2099	2149	4248

Sumber : Kantor Desa Kalobba

Pada Tabel 2.4 dapat dibahas yakni memiliki kegiatan dalam pembinaan Desa dan jumlah mata pencaharian serta dapat meningkatkan sumber daya manusia yang cukup meningkat berdasarkan jumlah penduduk yang dapat dihitung melalui data jumlah Penduduk awal Bulan dan jumlah penduduk akhir Bulan pada Bulan April 2014 yang memiliki tambahan dan pengurangan penduduk perbulan.

Potensi Desa adalah batas Desa yang memiliki karakter dalam mengelola sumber daya manusia serta membangun masyarakat yang berkualitas dan mengembangkan mata pencaharian di beberapa Desa, potensi Desa Kalobba memiliki 5 kepala Dusun dan 5 Imam Dusun terbagi di beberapa Desa terdiri dari 8 RW, 18 RT dengan melihat KK 1113, KTP, sebagian dari proses Pemilihan Legislatif, disamping itu pengembangan Potensi Desa binaan melalui Instansi Pemerintahan yang terkait dapat dijadikan pokok perbincangan berdasarkan luas (HA), dengan penggunaan Tanah milik Pemerintah dengan luas 2180,80 pemeliharaan Hewan Ternak berjumlah 1232 Ternak, dengan merujuk pada pengembangan potensi Desa, Desa tersebut merupakan bukti kesatuan dalam menghadapi perjuangan kerajaan yang ada disinjai Selatan sejak Tahun 1639 dari gabungan Raja – Raja ada di Kabupaten Sinjai dengan peninggalan Sejarah dikenal dengan Benteng Balangnipa. Jumlah penduduk potensi Desa memiliki jumlah tambahan Penduduk awal Bulan sebanyak 4247, Penduduk akhir Bulan sebanyak 4248 Penduduk berada pada daerah daratan sebelah Utara.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi public pada dasarnya merupakan bagian partisipasi pada umumnya. Merujuk pada hasil survey Charles andrain dan james smith mengelompokkan tiga bentuk partisipasi. Pertama adalah partisipasi yang lebih pasif didalam tipe pertama ini partisipasi dilihat dari keterlibatan polittik seseorang yakni sejauh mana orang itu melihat politik sebagai sesuatu yang penting memiliki minat terhadap politik yang lebih aktif yang menjadi perhatian adalah sejauh mana orang itu terlibat didalam organisasi – organisasi atau asosiasi – asosiasi sukarela seperti kelompok – kelompok keagamaan, olahraga pecinta lingkungan dan organisasi profesi.

Dalam kategori semacam itu partisipasi public memang tidak secara khusus bisa masuk kedalam salah satu dari dua penjelasan seperti yang telah disinggung partisipasi public seringkali lebih ditekankan pada proses pada pembuatan dan pelaksanaan keputusan public seperti terlibat dalam pertemuan – pertemuan public, melakukan inisiatif dan referendum (referensi).

Selain membuka ruang bagi adanya system multipartai dan pemilu yang bebas dan adil, upaya membangun relasi yang lebih baik antara wakil dan terwakil dan partisipasi public dilakukan melalui desain kelembagaan lain Pada pemilu tahun 2014 tanggal 9 April Desa Kalobba masih tetap menganut system proporsional

besaran distriknya (*district magnitude*) atau yang dikenal sebagai Daerah pemilihan diperkecil. Maksudnya, agar perbandingan nilai perolehan suara antara wakil dan terwakili yang sebelumnya renggang bisa terjembatani. Secara teoritis melalui system Daerah pilihan yang lebih kecil, para wakil rakyat akan merasa memiliki kedekatan dengan konstituennya, karena siapa yang menjadi konstituennya jelas dan berada didalam suatu wilayah tertentu. Disamping itu proses pemilihan calon juga sudah mulai menggunakan system semi daftar terbuka, melalui system demikian, para pemilih diharapkan mengenal lebih baik calon yang mereka pilih.

Adanya sosialisasi politik yang diberikan kepada individu maka diharapkan akan memunculkan kesadaran politik individu untuk kemudian tidak hanya diam tetapi melakukan aktifitas yang termasuk dalam partisipasi politik warga Negara dengan berbagai macam tindakan, partisipasi politik diartikan sebagai aktifitas warga yang bertujuan memengaruhi kebijakan politik, aktifitas berarti perilaku eksternal yang ditampilkan oleh warga melalui kebijakan yang diambil alih oleh partai – partai politik. Berdasarkan pada rumusan masalah, dimana untuk mengetahui partisipasi politik kaum muda diKecamatan Tellulimpoe Sinjai Selatan.

Bab ini akan mengulas secara mendalam tentang partisipasi Masyarakat dalam pileg kaum muda, cakupannya berkisar pada

pilihan – pilihan politik, selain itu terdapat sikap dan budaya yang juga berupa perilaku dalam pemilihan legislatif tahun 2014 dikecamatan tellulimpoe. Ada berbagai hasil yang ditemukan pada bagian ini, kondisinya tidak sama pada setiap kaum muda, sebab setiap kaum muda memiliki konteks dan pemikiran masing – masing. Selain itu, factor – factor social juga berpengaruh pada kehidupan social, adanya akses informasi yang berbeda dan juga proses partisipasi dilingkungan masing – masing juga menjadi variabel yang sangat legislatif.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tellulimpoe Sinjai Selatan, penelitian ini berlangsung selama satu bulan lebih yaitu pada Tanggal 11 Juni sampai dengan 9 Agustus Tahun 2014. Adapun data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan informan, berbagai literature dan artikel – artikel surat kabar dan juga tulisan – tulisan yang berhubungan dengan tema yang diteliti dan sangat membantu dalam penelitian ini.

Melakukan penelitian ini sebanyak dua informan yaitu Kepala Desa dan KPPS Kecamatan tellulimpoe informan ini masing –²² masing profesi yang hamper sama, diantaranya yakni Kepala Desa dan²³ KPPS Sinjai Selatan dikalangan Kaum muda yang memiliki pengalaman politik atau mengetahui dunia politik dan para tim sukses

-
1. ²²Wawancara dengan Puang Makmur di Kantor Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe 8 Agustus 2014, pukul 15.00 WITA.
 2. Wawancara P.Alimuddin selaku tokoh masyarakat Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe tanggal 8 Agustus 2014 pukul 15.

yang berperan aktif dalam pemilihan legislatif di Kecamatan Tellulimpoe dan mengetahui tentang dunia perpolitikan kaum muda pada masa sekarang. Masing – masing informan ini kesemuanya berdomisili dikecamatan Tellulimpoe, pada topic ini dihadirkan gambaran tentang partisipasi politik kaum muda dan hal – hal yang mendasari pilihan politik tersebut. Terdapat juga factor social yang memengaruhi partisipasi politik menjadi sangat beragam, factor – factor social pun menjadi hal yang sangat berpengaruh dan dari hal tersebut dapat diidentifikasi orientasi pemilih dan hal – hal yang mendasari pilihan – pilihan politik kaum muda di Kecamatan Tellulimpoe Sinjai Selatan.

Adapun yang dibahas dalam peneliti skripsi penulis antara lain sebagai berikut:

A. Partisipasi Politik Pemilihan legislatif Kaum Muda

Hasil penelitian penulis di Desa Kalobba kecamatan Tellulimpoe adalah calon legislatif muda hanya ada 1 calon dari desa yang ingin bahas.

Andi Umar Tahir berumur 27 tahun yang saya temukan dikediamannya dari fraksi Golkar dan Kartini berumur 26 dari fraksi Gerindra usulan dari partai Gerindra. Nama-nama tersebut merupakan salah satu tokoh yang signifikan di Desa Kalobba. Namun A. Umar Tahir tidak terpilih sebagai anggota DPRD Sinjai.

Menuurut hasil wawancara, A.Umar Tahir mengatakan bahwa dalam bahasa indonesia “saya maju sebagai calon legislative Desa Kalobba, karena

saya ingin membangun daerah saya sendiri.”²⁴ Menurut penulis tentang hasil wawancara bahwa A. Umar Tahir menjelaskan mengapa mencalonkan sebagai anggota legislative Kabupaten Sinjai. Dikarenakan keadaan Desa yang butuh diperjuangkan.

Informan penulis yang bekerja sebagai aparatur Negara, Ibu Wildah mengatakan bahwa partisipasi dari calon Legislatif muda tersebut kurang maksimal. Karena tidak sesuai harapan sebagai calon pemimpin. Salah satu contohnya yang diutarakan Ibu Wildah adalah kandidat hanya menggunakan spanduk dan kalender sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat Desa Kalobba.²⁵

Ardi²⁶ adalah informan penulis yang masih menyandang status pelajar yang mencapai umur untuk memilih di Desa Kalobba. Menurutny bahwa dirinya memilih kedua calon tersebut. Karena pemaksaan dari kedua orang tuanya. Sedangkan Pak Madi yang mempunyai pekerjaan sebagai petani tidak memilih mereka. Disebabkan bahwa kurangnya pergaulan kepada para petani.²⁷

Peneliti juga mewawancarai Alimuddin di Desa Kalobba.” Menurut Alimuddin, masyarakat khususnya kaum muda di Desa Kalobba sangat antusias dalam pemilihan legislative maupun pemilihan umum lainnya” . Mereka tidak hanya sekedar memilih, tetapi turut aktif dan mengetahui visi

²⁴ Wawancara Andi Umar Tahir Selaku Sebagai Calon Legislatif Fraksi Golkar pada Tanggal 1 April Tahun 2014 Jam 03;00 WITA.

²⁵ Wawancara Ibu Wildah Sebagai Aparatur Negara di Desa Kalobba pada Tanggal 24 April Tahun 2014 Jam 09;15 WIB.

²⁶ Wawancara Ardi Selaku Sebagai Pelajar pada Tanggal 24 April Tahun 2014 Jam 05;00 WIB.

²⁷ Wawancara Pak Madi Selaku Masyarakat yang Bekerja Sebagai Petani pada Tanggal 22 April Tahun 2014 Jam 04;00 WITA

dan misi setiap kandidat. Selain itu, bentuk partisipasi politik kaum muda lainnya adalah dengan mengadakan²⁸ pesta demokrasi pada masing-masing kandidat pilihannya dan wilayah pemilihan.

Keikutsertaan kaum muda pada wilayah yang mempengaruhi kebijakan politik dan menganggap bahwa kaum muda harus punya peran dalam pemilihan legislatif ataupun pemilihan umum lainnya. Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Kepala Kelurahan Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe yang mengutarakan bahwa kaum muda sudah mulai cerdas dan pintar dalam berpartisipasi politik. Informasi yang diterima akan saling terkait dengan lingkungan social dan karakter dan aspek kognisi kaum muda, selain itu akan diidentifikasi keikutsertaan dan informasi yang diterima tentang proses tersebut seperti kandidat – kandidat yang maju pada pemilihan legislatif pada Tahun 2014. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sejauh mana informasi yang diterima oleh kaum muda pada proses pemilihan legislatif Tahun 2014, maka diajukan beberapa pertanyaan sebagai indicator untuk mengetahui hal tersebut untuk mengetahui keikutsertaannya pada pemilihan legislatif.

Di antaranya bagaimana pendapat masyarakat tentang partisipasi politik dalam pemilihan legislatif diKecamatan Tellulimpoe Sinjai Selatan dan bagaimana pendapat masyarakat tentang pemilihan legislatif Kecamatan Tellulimpoe Tahun 2014, apa factor yang paling dominan memengaruhi masyarakat dalam pemilihan legislatif di Kecamatan

³Wawancara P.Alimuddin selaku tokoh masyarakat Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe tanggal 8 Agustus 2014 pukul 15.45 WITA

Tellulimpoe. Pertanyaan yang lebih mendetail juga diajukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang informasi dan pengetahuan kaum muda seperti tanggapan terhadap keterlibatan kaum muda pada proses pemilihan legislatif berpengaruh pada kehidupannya. Dari hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa ke KPPS dengan informan Kepala Desa Azhar Pasahi dan Kaur Pemerintahan; Makmur S.Ag di Kecamatan Tellulimpoe mengaku melibatkan diri atau turut berpartisipasi pada pemilihan legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Tellulimpoe, dia mengakui banyak informasi yang dia terima tentang proses politik tersebut.

Dalam melihat partisipasi politik kaum muda yang terjadi diwilayah pemerintahannya, Puang Makmur mengaku kaum muda memiliki alasan yang kuat dan sangat bijak untuk menjatuhkan pilihannya berdasarkan keinginan hal ini karena kaum muda sekarang telah teliti walaupun mereka tinggal dipinggiran Kota, dimana letak wilayahnya adalah kelurahan tapi keadaan geografisnya masih terlihat seperti sebuah Desa, Azhar Pasahi mengungkapkan; *Kalau menurut saya, pemilihan legislatif sangat menyетуinya karena Memilih wakil yang akan memperjuangkan keperluan – keperluan yang dibutuhkan masyarakat, terutama masyarakat Desa Kalobba*²⁹

Pada hasil wawancara” Azhar Pasahi dapat menjelaskan bahwa keadaan perpolitikan di Desa Kalobba Masyarakat telah memilih pemimpin -

²⁹Wawancara Bapak Azhar Pasahi selaku Kepala Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe tanggal 8 Agustus 2014 pukul 17.25 WITA

pemimpin yang lebih baik yang memiliki pemikiran bersifat positif, memperbaiki kebijakan pemerintah dan bisa dipercayai oleh anggota masyarakat setempat dalam pemilihan Dewan perwakilan daerah dan sangat antusias masyarakat memilih caleg muda yang berpengalaman, dari hasil wawancara oleh kaur pemerintah telah diungkapkan kembali setelah ditemukan di Desa Kalobba” Puang Makmur telah ditemukan kediamannya mengatakan bahwa; yang pertama dibutuhkan disini adalah jalanan desa yang masih banyak Yang memerlukan pengerasan, pengaspalan dan pengecoran pada hasil wawancara diatas telah digambarkan bahwa dalam kebijakan pemerintah perlu memperhatikan sarana – prasarana jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemilihan kandidat pada tahap pemilihan dewan perwakilan daerah dan wakil kepala daerah agar masyarakat melihat langsung hasil pemilihan DPRD Sinjai ditengah masyarakat yang bersifat positif seperti halnya pada pemilihan kepala desa agar hasil pemilihan tidak dapat diresapi oleh masyarakat.

Desa Kalobba,” Puang makmur menjelaskan kembali bahwa; partai yang dipilih dalam pemilihan kandidat sangat Banyak, antarlain: Partai Golongan Karya, PKB, PBB, PKS, NASDEM, PPP, HANURAH, GERINDRA, dan masih ada yang lain, dalam hasil wawancara diatas dapat memperoleh gambaran yang jelas yang dilakukan dikelurahan oleh puang Makmur menjelaskan bahwa dalam pemilihan Kandidat yang telah dilakukan di Desa kalobba bahwa dalam pemilihan kandidat dan perpolitikan dapat menunjukan pemilihan anggota DPD usulan suara yang

berasal dari provinsi memiliki satu calon calon yang akan dipilih dari beberapa usulan partai antara satu partai dengan partai perlu memperhatikan kebijakan masyarakat berasal dari usulan pemerintah agar pemimpin yang dipilih perlu memperhatikan masyarakat pada pemilihan selanjutnya. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara di Desa Saotengah setelah ditemukan di Desa Kalobba Puang Makmur menjelaskan kembali bahwa; Kalau saya hanya membrikan dukungan salah satu partai saja dalam hasil wawancara diatas dapat memperoleh gambaran yang jelas saat ditemukan di Rumah Puang Makmur menjelaskan bahwa dalam memberikan dukungan salah satu partai oleh masyarakat setempat perlu masyarakat mengetahui bahwa usulan Partai yang akan didukung harus dilakukan secara damai melalui kampanye untuk memilih yang lebih baik dan bisa memimpin.³⁰

Kaum muda biasanya mengikut dengan pilihan politik orang – orang dekat yang berada di sekitarnya, dalam kelompok social melibatkan nilai – nilai yang terpahami oleh anggota kelompoknya, sikap dan perilaku sebagai aksi dari pemahaman memiliki latar belakang dan konteks yang berbeda dengan anggota kelompok lainnya, hal ini juga melibatkan proses –proses dan peristiwa historis yang bertautan dengan nilai – nilai dalam kelompok social tersebut. Pada dasarnya, proses sosialisasi dalam kelompok – kelompok social melibatkan proses transmisi nilai – nilai yang terpahami oleh kelompok

³⁰ Wawancara Makmur selaku masyarakat di Desa Kalobba Tanggal 26 April 2014 pada Jam 03:00 WITA.

tersebut terhadap pemilihan legislatif. Itulah hasil penelitian peneliti di lapangan yang menganggap masih kekurangan partisipasinya di masyarakat.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Kaum Muda

Setiap pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia, setiap Warga Negara yang terdaftar berhak untuk ikut berpartisipasi dan menjatuhkan pilihan – pilihan berdasarkan keinginan dan penilaiannya, Keikutsertaan kaum muda yang merupakan kelompok besar secara kategori, hal ini dapat diukur pada proses pemilihan legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Tellulimpoe khususnya Sinjai Selatan. Tingkat partisipasi kaum muda dapat dibandingkan dengan jumlah kuantitas yang pada dasarnya akan merasakan hasil dari pesta demokrasi ini, pada pemilihan legislatif Tahun 2014, pilihan – pilihan politik kaum muda tidak hadir begitu saja atau muncul dengan sendirinya, akan tetapi dipengaruhi oleh berbagai hal, kaum muda dan politik merupakan suatu fenomena yang sangat menarik dan khas, karena didalamnya mencakup segala pola politik kaum muda dengan berbagai factor social yang mempengaruhinya.

Pemilihan legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Tellulimpoe merupakan suatu rangkaian proses demokrasi yang telah menyajikan berbagai macam rangkaian peristiwa, setiap individu akan menyambut hal tersebut secara berbeda – beda sesuai dengan informasi yang didapatkan. Dalam proses pemilihan legislatif ada banyak ragam informasi yang telah disediakan baik dari pihak pelaksana pemilihan legislatif terkait dengan tata cara memilih

dengan baik dan benar selain itu peserta pemilihan legislatif turut bekerja terutama tentang apa yang akan mereka lakukan sebagai bentuk kontribusi positif mereka jika ingin dipilih oleh para pemilih.

Menurut informan peneliti yang diambil secara random di masyarakat, bapak Andi Wahab mengatakan pendapatnya tentang kandidat yang mencalonkan tersebut. “Mereka berdua tidak terlalu aktif saat kampanye. Hanya mengandalkan spanduk dan kalender saja,”³¹ Ibu Titin berpendapat “Mereka hanya diam di rumah,”³² Bapak Adi yang kesehariannya sebagai petani mengatakan bahwa “Hanya janji dimulut, dan terlalu muda untuk jadi pemimpin,”³³ dan Ibu Rina “Jujur, saya sebagai masyarakat masih belum percaya mereka,”³⁴ dari berbagai informan peneliti yang mengutarakan pendapatnya tentang caleg muda semua hampir sama namun berbeda kata. Ini menandakan bahwa caleg muda di Desa Kalobba masih belum jelas partisipasinya di mata masyarakat.

Ada berbagai hal yang terlibat dalam proses munculnya partisipasi politik kaum muda, proses menjatuhkan pilihan dan pemahaman serta tanggapan terhadap berbagai fenomena politik didasari oleh berbagai hal dan factor social, hal ini akan memunculkan dimensi kognisi dan juga dimensi afeksi berupa hal – hal yang bersifat emosional.

³¹ Wawancara Andi Wahab Selaku Masyarakat di Desa Kalobba Kecamatan Telulimppoe Tanggal 25 April 2014 pada Jam 04;00 WITA

³² Wawancara Ibu Titin Selaku Masyarakat di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Tanggal 25 April 2014 pada Jam 09;00 WITA

³³ Wawancara Adi sebagai Masyarakat yang Bekerja sebagai Petani di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Tanggal 25 April 2014 Pada Jam 02;00 WITA

³⁴ Wawancara Rina sebagai Masyarakat di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Tanggal 25 April 2014 pada Jam 12;00 WITA

Selain itu, terdapat dimensi evaluative yang menjadi preferensi dalam bersikap selanjutnya, dari pernyataan diatas maka dari itu untuk mengetahui factor – factor yang mendasari atau memengaruhi partisipasi politik kaum muda dan hal – hal yang mendasari pilihan – pilihan politiknya, maka diajukan pertanyaan – pertanyaan inti untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas atau lebih detail dari informan yang diwawancarai.

Pertanyaan yang diajukan adalah partisipasi mereka dalam pemilihan legislatif Tahun 2014 sekarang ini, pertanyaan keduanya adalah hal – hal yang mendasari ketika menjatuhkan pilihan politiknya pada saat pemilihan legislatif Tahun 2014. Di samping kedua pertanyaan utama tersebut, diajukan beberapa pertanyaan, dalam mengajukan pertanyaan bagi peneliti juga melihat kondisi masyarakat dan kaum muda yang sangat antusias dalam pemilihan legislative maupun mencalonkan diri sebagai anggota legislative sebagai bentuk kepemimpinan partai politik maupun anggota legislatif melalui proses wawancara disamping mewawancarai kaum muda peneliti juga memberikan pertanyaan kepada kaum muda dalam menemukan jawaban yang bertujuan untuk mengontrol dan mengarahkan jawaban informan yang lebih valid, dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat ditemukan beberapa factor yang mempengaruhi pilihan politik kaum muda pada pemilihan legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Tellulimpoe Sinjai Selatan antaranya adalah:

1. Modernisasi

Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan meluasnya peran media massa dan media komunikasi, kemajuan itu berakibat pada meningkatnya partisipasi Warga Negara terutama diperkotaan untuk turut serta dalam kekuasaan politik merupakan tolak ukur perpindahan partai – partai politik yang ingin memilih pasangan kandidat pada pemilihan legislatif tahun 2014 sebagai kekuatan masyarakat yang antusias mengikuti pemilihan legislatif. Sebagai contoh di Desa Kalobba, akibat modernisasi masyarakat kurang paham tentang dunia perpolitikan dalam mani – mani politik

2. *Proses Terjadinya*

Perubahan – perubahan struktur kelas esensial. Dalam hal ini adalah munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi, kemunculan mereka tentu saja dibarengi tuntutan –³⁵ tuntutan baru pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan – kebijakan pemerintah.

3. *Pengaruh Intelektual dan Meningkatnya Komunikasi Politik*

Ide – ide nasionalisme, liberalism, egaliterisme membangkitkan tuntutan – tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, komunikasi yang meluas mempermudah dalam memilih calon anggota legislatif. Contoh caleg muda di Desa Kalobba memakai strategi politiknya menggunakan Kalender untuk meningkatkan komunikasi

³⁵[Http://www.faktor memengaruhi partisipasi politik.geogle.com](http://www.faktor.memengaruhi.partisipasi.politik.geogle.com)

politik dalam pemilihan calon anggota legislative yang bertujuan untuk memperoleh kematangan berfikir terhadap kepemimpinan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif serta masyarakat dan kaum muda menginginkan lolos dalam pemilihan DPD dan DPRD

4. *Adanya konflik di antara pemimpin – pemimpin politik*

Pemimpin politik yang saling memperebutkan kekuasaan, seringkali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa, dalam konteks ini seringkali terjadi partisipasi yang sangat antusias dalam pemilihan legislatif. Seperti kandidat Andi Umar Tahir dari fraksi Golkar mencari dukungan dengan spanduk dan menggunakan kartu tanda pengenal calon anggota legislative di tiap – tiap Dusun, menandakan meningkatkan mobilisasi politik dalam dukungan partai politik melalui mani – mani politik

5. *Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan social*

Ekonomi dan kebudayaan meluasnya ruang lingkup aktifitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam memengaruhi perbuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan, yang dipengaruhi keterlibatan hasrat dan martabat dari masing – masing manusia dalam kehidupan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoedapat disimpulkan bahwa dalam melihat partisipasi politik kaum muda yang terjadi, salah satu petugas pemerintahannya mengaku bahwa kaum muda memiliki alasan yang kuat dan sangat bijak untuk berpartisipasi dalam pemilihan legislative menjatuhkan pilihan sesuai keinginannya dalam hal ini kaum muda biasanya mengikut dengan pilihan politik orang – orang dekat yang berada disekitarnya serta dalam kelompok social melibatkan nilai – nilai yang terpahami oleh anggota kelompoknya dikecamatan tellulimpoe sebelum melakukan pemilihan legislative dengan membawa KTP dimasing – masing TPS pada umumnya yang sangat antusias masyarakat dalam mengikuti pemilihan legislative sebagai pendukung dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada khususnya masyarakat dapat mengetahui pemimpin pada saat pemungutan suara di TPS,dengan melihat hasil pemungutan suara di mata masyarakat khususnya Kecamatan tellulimpoe sangat senang terhadap pemimpin yang mereka pilih terhadap parpol. Tanggapan masyarakat di Kecamatan tellulimpoe terhadap hasil perhitungan suara di TPS bahwa hasil perhitungan pemungutan suara dalam tiap tiap TPS di beberapa desa melalui proses sosialisasi dalam kelompok – kelompok social, pendapat masyarakat terhadap pemilihan legislative sangat tinggi terhadap pasangan calon yang dipilih dan memiliki manfaat cukup besar terhadap *Pilkada* pada khususnya.

B. Saran

Tidak dapat dipungkiri bahwa harapan warga terhadap pilkada langsung adalah mewujudnya yang menyertakan pelibatan rakyat bagi banyak pihak, merupakan secercah langkah maju dalam mewujudkan demokrasi di level local dalam pemilihan legislative Kecamatan Tellulimpoe Tahun 2014 adalah pemilihan umum demokratis yang dilakukan Negeri ini, harus diakui masih banyak kekurangan dalam suatu kesempatan, pemilu legislative meski telah berlangsung dengan suara terbanyak dalam menentukan siapa kandidat yang akan menduduki jabatan sebagai dewan perwakilan daerah, dalam melakukan penelitian ini terdapat berbagai saran yang akan disampaikan oleh peneliti antaranya adalah;

1. Peningkatan akses informasi dan perluasan informasi mengenai proses pemilihan DPD, DPRD Tahun 2014 sekecamatan Tellulimpoe secara sistematis perlu dilakukan untuk mampu menjangkau pemilih – pemilih kaum muda yang berada di Desa tersebut dan dari berbagai kalangan dan lapisan social, baik sosialisasi melalui media cetak, audio visual, seminar politik serta penyuluhan Kesehatan.
2. Sebagai sebuah refleksi akademis sewajarnya diskursus mengenai pilkada patut dikomunikasikan dengan cara mengingat pemilih kaum muda berasal dari kondisi social yang berbeda – beda dengan tingkat pendidikan yang tidak sama dan hal sangat berkorelasi dengan social.
3. Menjadikan fasilitas – fasilitas yang dapat mendukung kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam dunia perpolitikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers.
- Agustino, Leo. *Pilkada dan dinamika politik local*. pustaka pelajar. Bandung.
- Effendi Bachtiar. Cetakan; *Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Diindonesia*.
- Hardiman, F Budi. *Ruang Publik (Melacak Partisipasi Demokrasi dari Polis sampai Cyber Space)*. Kanisias. Yogyakarta.
- Harison Lisa. Kencana. *Metodelogi Penelitian Politik*. Kencana Prenada Media Group. Djakarta.
- Hidayat Syarif. *Bisnis Dan Politik diTingkat Lokal*. Djakarta: LIPI.
- Ikbal Muhammad. M.AG. *Pemikiran Politik Islam Klasik*. Kencana Prenada Media Group. Djakarta.
- Kencana Syafie Inu. M. SI. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Rafika Aditama. Bandung.
- Mariana Dede. Pascalino Karolina, Graha Ilmu. *Demokrasi dan Politik Ditengah Desentralisasi*. Graha Ilmu.
- Marijan Kacun. Kencana. *Sistem Politik Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Michalsen, Britha. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Penerbit Buku Obor.
- Muhtar Lubis Atas Negara, *Manusia Diindonesia dan Prilaku Politik*. Penerbit Buku Obor.
- Rafika Aditama. Djakarta. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Kencana Prenada Media Group. Djakarta.
- Sanit, Arbi. *System Politik Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Subiakto Hendry. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Kencana Prenada Media Group. Djakarta.
- Sumarto, Hefifah SJ. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Penerbit Buku Obor. Jakarta.

Syamsuddin, Haris. *Pemilu Langsung diTengah – Tengah Oligarki Partai*.
Djakarta: Penerbit Gramedia.

Widjayanto, Andi. *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*. L-Klas Fisip UI. Jakarta

Yusron . LP3S. *Elit Lokal dan Sipil Society (Kediri Ditengah Demokratisasi)*.
Edisi Refisi LP3S.

Zuhro, Siti. *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kestinambungan*. Penerbit Ombak.
Yogyakarta.

